



# LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2022



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## KATA PENGANTAR

**LAPORAN KINERJA (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022** ini adalah penjabaran KINERJA dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

LAPORAN KINERJA (LKj) adalah gambaran Kinerja **Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang telah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan tahunan yang dilaksanakan selama periode Januari – Desember Tahun 2022.

Tersusunnya **LKj** ini diharapkan akan terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan dan Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan **Dinamika Pembangunan** Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK dan Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal, Januari 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**DIAN ISMAIL PARIPURNA, S.Sos.**

**Pembina Tk. I**

NIP. 19730505 199602 1 001

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Tugas dan Fungsi	6
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Isu – isu Strategis	10
1.6. Maksud dan Tujuan	12
1.7. Sistematika Penulisan	13
<b>BAB II     Perencanaan Kinerja</b>	
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Indikator Kinerja Utama	22
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2021	24
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
<b>BAB III    Akuntabilitas Kinerja</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2. Realisasi Anggaran	
<b>BAB IV    Penutup</b>	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* (keperintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju "*good governance*" adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik.

Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya (*performance*-nya) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016- 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2022, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

## **1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

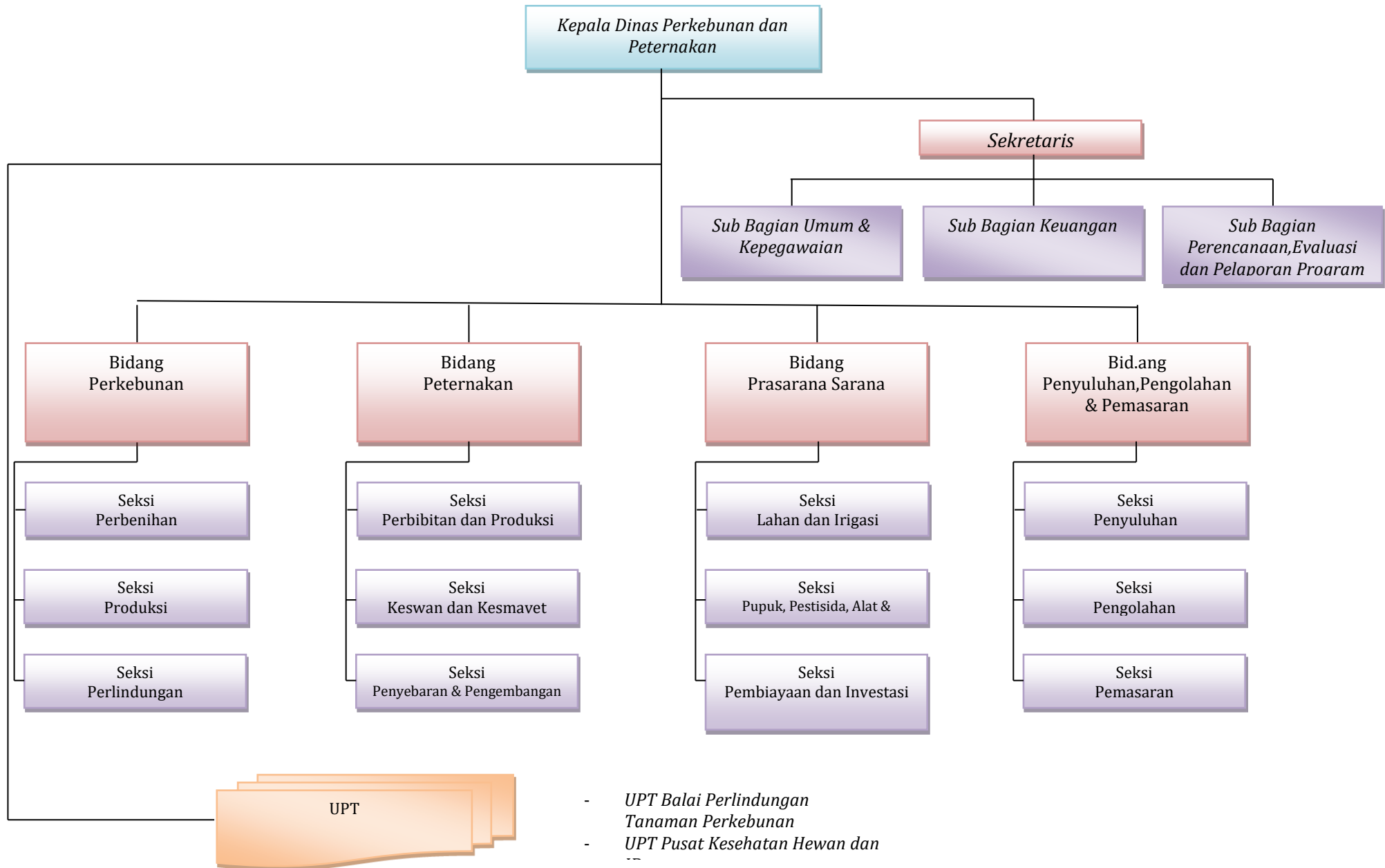
1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kepala Seksi

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Perbenihan
  2. Seksi Produksi
  3. Seksi Perlindungan
- d. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Pembibitan dan Produksi.
  2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
  3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Lahan dan Irigasi.
  2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.
  3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Penyuluhan.
  2. Seksi Pengolahan.
  3. Seksi Pemasaran.
- g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)**, terdiri dari :
  1. UPT Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
  2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan

#### h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar dibawah berikut :





### 1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas perkebunan dan Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

### 1.4. SUMBER DAYA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah mencakup sumber daya aparatur, sarana prasarana yang dimiliki serta asset lainnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melibatkan unsur aparatur dengan jumlah, status dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel – tabel berikut ini :

Tabel 1.1. : Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Golongan  
Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	8
2.	III	19
3.	II	4
4.	I	-

Tabel 1.2. : Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Alokasi Unit  
Kerja Tahun 2022

No.	Unit Kerja	PNS	TKK	JUMLAH
1.	Sekretariat	10	11	21
2.	Bidang Perkebunan	3	8	11
3.	Bidang Peternakan	6	7	13
4.	Bidang Prasarana dan Sarana	4	5	9
5.	Bidang Penyuluhan	3	4	7
6.	UPT Perlindungan Tanaman	1	2	3
7.	UPT Puskesmas dan IB	4	21	25
	JUMLAH	31	58	69

Tabel 1.3. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat  
Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	0
2.	S1	24
3.	D3	1
4.	D2	0
5.	D1	0
6.	SLTA	6
7.	SLTP	0
8.	SD	0

Tabel 1.4. : Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
A.	<b>Struktural</b>	9
	Eselon II.b	1
	Eselon III.a	1
	Eselon III.b	4
	Eselon IV.a	1
	Eselon IV.b	2
B.	<b>Fungsional</b>	10
	Medik Veriner Muda	1
C.	Pelaksana	11
	JUMLAH	31

## 2. Kelembagaan

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini ditangani oleh berbagai kelembagaan formal maupun informal dengan peran dan fungsinya yang secara umum sudah terbagi secara proposional, meskipun demikian dari aspek teknis dan non teknis pelaksanaan fungsi dan peran kelembagaan tersebut belum dapat terfasilitasi secara optimal.

Aspek kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan terutama sekali jika dikaitkan dengan kelembagaan formal sebagai pengawal kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disamping secara formal ditangani oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan juga banyak melibatkan peran dari lembaga formal maupun informal lainnya, antara lain :

- a. Lembaga Tingkat Pusat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam proses pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Medan, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta beberapa UPT Pusat yang secara khusus

- menangani komoditas tanaman perkebunan.
- b. Lembaga Tingkat Provinsi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik langsung maupun tidak langsung antara lain yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Jambi, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) Provinsi Jambi, UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan (BPPBTP) Provinsi Jambi serta Balitbangda Provinsi Jambi.
  - c. Organisasi /kelembagaan yang terkait dengan pembangunan perkebunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Asosiasi Petani Kelapa Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Karet Indonesia, Masyarakat Pencinta Indikasi Geografis (MPIG) Kopi dan Asosiasi Petani Rempah Indonesia.

### **3. Sarana dan Prasarana**

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejauh ini juga telah ditunjang oleh keberadaan sarana prasarana yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain berupa Kebun Sumber Benih Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kopi Libtukom, Kebun Percontohan Kelapa Sawit, Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, UPT Puskesmas dan IB, UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan, Kandang Ternak di Bram Itam, Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Perkebunan dan Peternakan serta Prasarana Budidaya (saluran Tata Air Mikro, Lantai Jemur Pinang dan Jalan Produksi).

Upaya penyediaan sarana prasarana perkebunan dan peternakan tersebut telah dilakukan melalui dukungan anggaran APBD maupun APBN yang bersifat stimulant untuk mendorong masyarakat/petani dalam memfasilitasi kebutuhannya secara swadaya.

Adapun sarana prasarana aparatur yang mendukung aktivitas pokok dan secara langsung dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan serta merupakan aset dinas adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.5. : Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Dinas	1 unit	Baik
2.	UPT Perlindungan Perkebunan	1 unit	Baik
3.	UPT IB dan Puskesmas	4 unit	3 unit Baik, 1 unit perlu di rehab
4.	Kebun Pembibitan Kelapa Sawit	5 Ha	Baik
5.	Kebun Percontohan Kelapa Sawit	5 Ha	Baik
6.	Kebun Percontohan Kopi Libtukom	1 Ha	Baik
7.	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit	Baik
8.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	4 unit	Baik
9.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)	54 unit	33 unit Baik, 21 unit rusak berat
10.	Kendaraan Roda 3 (Viar)	3 unit	1 unit baik, 2 unit rusak berat

### 1.5. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu – isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan isu – isu strategis yang sedang terjadi maupun isu – isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi Sumber Daya Manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas juga mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi

dinamika pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan perkebunan dan peternakan yang masih menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diinventarisasi dan dipetakan dalam suatu pohon masalah untuk pemahaman dalam penentuan kebijakan.

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan selama tahun 2022 dihadapkan kepada beberapa permasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bidang Perkebunan</b>					
Produktivitas Komoditi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Produktivitas Komoditi Perkebunan tahun sekarang dibagi produktivitas komoditi perkebunan tahun lalu	a. SDM Petugas Bidang Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan c. Ketersediaan bibit unggul pinang, kopi libtukom dan kelapa dalam d. Banyak tanaman tua/tanaman rusak	a. Pengetahuan petani yang masih rendah dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna. b. Perubahan iklim dan bencana alam c. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan d. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan e. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah	a. Masih kurangnya anggaran yang langsung bersentuhan dengan petani b. Kurangnya pelatihan yang berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan c. Kurangnya SDM teknis d. Pengetahuan SDM Bidang Perkebunan dalam penguasaan teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan
<b>Bidang Peternakan</b>					

Populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 1,2 % per tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih perlunya peningkatan SDM Petugas peternak</li> <li>b. Masih adanya kematian pedet (anak sapi), abortus pada ternak dan interval kelahiran yang masih jauh</li> <li>c. Minimnya sarana dan prasarana</li> <li>d. Kurangnya tenaga medis dan paremedis</li> <li>e. Belum tersedianya HPT Unggul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif</li> <li>b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas</li> <li>c. Masih adanya Pencurian ternak</li> <li>d. Masih adanya keluar masuk ternak yang tidak terdata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis</li> <li>b. Kelembagaan dan SDM Peternak dan Tenaga Teknis</li> <li>c. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan tekhnis</li> </ul>
------------------	---	--	--	---	--

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2022 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

## 1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKj ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan selama Tahun 2022 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKj ini.

Dalam LKj ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan pada Tahun 2022, yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 6 (enam) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.
- Bab I           Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II           Perencanaan Kinerja menyajikan ringkasan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- Bab III          Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang telah digunakan.
- Bab IV          Penutup berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS (2021 - 2026).**

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut

dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja (LKj) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKj ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah dirumuskan pada tahun 2021, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat Tahun 2021-2026 tersebut, adalah sebagai berikut :

#### **2.1.1. VISI dan MISI Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian serta melihat

#### **Visi :**

***Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024  
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan  
Harmonis)***

potensi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan **Visi Pembangunan** Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

**Mengandung Makna** bahwa : “Mewujudkan pembangunan Perkebunan dan Peternakan dalam suatu penataan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengintegrasian kegiatan **produksi, pengolahan, distribusi** kegiatan **On Farm** dan **Off Farm** dalam suatu **Sistem Manajemen** dengan menciptakan *Produk-Produk Unggulan* Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026** sebagai berikut:

KODE	MISI
MISI 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak
MISI 2	Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis
MISI 3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
MISI 4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
MISI 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada **Misi Ketiga**, yaitu **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik**, dan **Misi Keempat**, yaitu **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut

adalah dengan Program dan Kegiatan prioritas pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar sektor Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sektor Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **2.1.2. TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah **Tujuan Strategis**.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis** yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis** yang akan dicapai pada masa mendatang. Hal tersebut tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor perkebunan dan peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :						
			- Kelapa Sawit	121.136	123.074	125.166	127.419	129.840	132.437
			- Karet	3.833	3.848	3.867	3.890	3.913	3.936
			- Kelapa dalam	55.050	55.490	55.989	56.549	57.171	57.800
			- Kopi	1.189	1.194	1.200	1.207	1.215	1.224
		- Pinang	10.557	10.663	10.780	10.909	11.039	11.182	
		2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :						
			- Sapi	9.086	9.267	9.452	9.641	9.833	10.029
			- Kerbau	744	758	773	788	803	819
			- Kambing	48.216	49.180	50.163	51.166	52.189	53.232
- Domba	829		845	861	878	895	912		
- Unggas	1.493.393	1.523.260	1.553.260	1.584.799	1.616.494	1.648.823			
2.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	69.60	69.80	69.90	70,10	70.20	70.30
			- Nilai IKM Perangkat Daerah	80.25	80.30	80.35	80.40	80.45	80.50

### 2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

#### Strategi:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan petani/pekebun.
3. Peningkatan Populasi dan Produksi ternak secara optimal.

#### Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. **Kebijakan Umum** Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien.
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan.

4. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
5. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan.
6. Terwujudnya fasilitas pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
7. Mendorong penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di jalaran Domestik dan Internasional
9. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang baik
10. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi
11. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat
12. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Inseminasi Buatan
13. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
14. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas
15. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan
16. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan

**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026**

<b>VISI : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS)</b>			
<b>MISI 4 : “ Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ”.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi sub sector perkebunan dan peternakan berbasis sumber daya alam lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	Meningkatkan produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun/petani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan</li> <li>2. Meningkatkan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan</li> <li>3. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan</li> <li>4. Terwujudnya fasilitas pembinaan dan penanganan usaha berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan</li> <li>5. Mendorong penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan</li> <li>6. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di jalaran Domestik dan Internasional</li> <li>7. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang baik</li> <li>8. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan/peternakan melalui bantuan – bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil produksi</li> <li>9. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun/peternak melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat.</li> </ol>



	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Peningkatan populasi dan produksi ternak secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Inseminasi Buatan</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan</li> <li>3. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas</li> <li>4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan</li> <li>5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan</li> </ol>
--	---------------------------------	---	--

**MISI 3 : “ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ”.**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien</li> </ol>

## **2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).**

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan telah mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dari kinerja ini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target (2022)
1.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan	<p>1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan Secara Optimal</p> <p>2. Meningkatnya Populasi Ternak</p>	<p>1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelapa Sawit</li> <li>- Karet</li> <li>- Kelapa Dalam</li> <li>- Kopi</li> <li>- Pinang</li> </ul> <p>2. Jumlah Populasi Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi</li> <li>- Kerbau</li> <li>- Kambing</li> <li>- Domba</li> <li>- Unggas</li> </ul>	<p>Jumlah Produksi pada tahun t)</p> <p>Mengukur populasi ternak pada tahun sekarang (t) = jumlah populasi ternak tahun lalu + kelahiran + pemasukan – kematian – pengeluaran – pemotongan</p>	<p>123.074</p> <p>3.848</p> <p>55.490</p> <p>1.194</p> <p>10.663</p> <p>9.267</p> <p>758</p> <p>49.180</p> <p>845</p> <p>1.523.260</p>

### 2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2022 sendiri dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.698.566.- yang diselenggarakan melalui 7 (tujuh) Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dengan 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dan 6 (enam) Program Pokok dengan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan, yang mana keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD II Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah sebagai berikut :

1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

2.	Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3.	Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan Sanksi
4.	Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5.	Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

## D

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2021.

### 2.4.1. PERJANJIAN KINERJA UTAMA

**Perjanjian Kinerja Utama** adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Bupati), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam **Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026**. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis OPD.

Untuk Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

**Target Penetapan Kinerja  
Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	TARGET 2022
1	2	3	4
1.	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang	123.074 3.848 55.490 1.194 10.663
	2. Meningkatnya Populasi Ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	9.267 758 49.180 845 1.523.260
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah  - Nilai IKM Perangkat Daerah	69.80  80.30

**2.4.2. PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)**

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Eselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome).

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kegiatan yang disepakati antara Kepala Bidang Eselon III dan Kepala Seksi/Kasubbag Eselon IV merupakan Indikator Kinerja (Output). Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2022**. Adapun untuk tahun 2022 ini Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

**Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2022**  
**Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	1. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan  2. Angka Penanggulangan OPT dan gangguan usaha perkebunan  3. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya  4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan  5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,6%, karet = 0,4 %, kelapa dalam = 0,8%,kopi = 0,4% pinang = 1,0%  2. 100 %  3. 22 %  4. 750 STDB  5. 25 %	Bidang Perkebunan  Bidang Perkebunan  Bidang Perkebunan, Bidang Saprasi dan Bidang Peternakan  Bidang Saprasi  Bidang Penyuluhan
	2. Meningkatnya populasi ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	6. Angka kebuntingan sapi yang di IB  7. Angka Kematian Ternak	6. Angka Kebuntingan Sapi = 71 %  7. 1.6 %	Bidang Peternakan  Bidang Peternakan
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	69.80 %	Bidang Sekretariat
			- Nilai IKM Perangkat Daerah	80.30 %	Bidang Sekretariat

**Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2022**  
**Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target 2022	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Meningkatnya Produksi komoditi perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1. Persentase peningkatan produktivitas komoditi perkebunan  2. Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya  3. Angka Penanggulangan OPT dan gangguan usaha perkebunan	1. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi  2. Jumlah SDG/Hewan Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian  3. Jumlah pemanfaatan SDG/Hewan Tanaman  1. Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  2. Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  3. Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang Dibangun, direhabilitasi dan Dipelihara  1. Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman  2. Jumlah luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan	1 laporam  3 VUB  1 dokumen  2 unit  1 unit  4 unit  1. 200 Ha  2. 30 Ha	Bidang Perkebunan     Bidang Saprass     Bidang Perkebunan



			<p>4. Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan</p> <p>5. Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternakan</p>	<p>1. Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</p> <p>1. Meningkatnya kapasitas pengembangan kelembagaan serta penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluhan pertanian</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>Bidang Supras</p> <p>Bidang Penyuluhan</p>
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	<p>1. Angka kebuntingan sapi yang di IB</p> <p>2. Angka Kematian Ternak</p>	<p>1. Meningkatnya penjaminan kemurnian kelestarian, pemanfaatan dan kualitas SDG Hewan/Tanaman</p> <p>2. Meningkatnya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</p> <p>1. Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis</p> <p>2. Terlaksananya pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 50 ekor, 0,5 ton</p> <p>1. 100 %</p> <p>2. 1 laporan</p>	<p>Bidang Peternakan</p> <p>Bidang Peternakan</p> <p>Bidang Peternakan</p>
2..	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<p>- Nilai AKIP Perangkat Daerah</p> <p>- Nilai IKM Perangkat Daerah</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Renstra, Renja, DPA, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja dan Lakip</p> <p>2. Laporan Keuangan Tahunan OPD</p> <p>3. Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN</p> <p>4. Cakupan Layanan Administrasi Umum</p> <p>5. Terlaksananya pengadaan BMD</p>	<p>1. 13 dokumen</p> <p>2. 1 laporan</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p>	Bidang Sekretariat

				penunjang urusan pemda		
				6. Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	5. 100 %	
				7. Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	6. 100 %	
					7. 100 %	

### 2.4.3. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022

Adapun Pagu Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>13.000.698.566</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.084.933.514</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>156.149.690</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.004.314
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.145.376
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.323.892.001</b>
	3 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.139.752.001
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.140.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>38.319.200</b>
	5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.319.200
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>720.279.884</b>
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.524.310
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.472.824
	8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.320.000
	9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.676.900
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000

	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.285.850
<b>5</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>126.282.000</b>
	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.282.000
<b>6</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>231.680.000</b>
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.160.000
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.220.000
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.300.000
<b>7</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>488.330.739</b>
	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.150.000
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	145.898.300
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.600.000
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.682.439
<b>2</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>725.339.928</b>
<b>8</b>		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>90.615.000</b>
	20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	90.615.000
<b>9</b>		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>548.014.720</b>
	21	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	22.775.000
	22	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	292.721.220
	23	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	232.518.500
<b>10</b>		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>86.710.208</b>
	24	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	53.140.000
	25	Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lainnya	33.570.208

<b>3</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>3.419.372.704</b>
<b>11</b>		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>3.337.273.500</b>
	26	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	132.350.000
	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.000.000
	28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.054.923.500
<b>12</b>		<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>82.099.204</b>
	29	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	82.099.204
<b>4</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.207.268.008</b>
<b>13</b>		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.066.482.968</b>
	30	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.066.482.968
<b>14</b>		<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>140.785.040</b>
	31	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	140.785.040
<b>5</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>200.772.232</b>
<b>15</b>		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>200.772.232</b>
	32	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	94.922.232
	33	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	105.850.000
<b>6</b>		<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>145.485.997</b>
<b>16</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.485.997</b>
	34	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	145.485.997
<b>7</b>		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>217.526.183</b>
<b>17</b>		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>217.526.183</b>
	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	153.623.163

	36	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	63.903.020
		<b>JUMLAH</b>	<b>13.000.698.566</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi) maupun data eksternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang

diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing OPD. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II dan III) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat dibawah Eselon III.

### **3.1.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut



Rumus 1:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Target Rencana Tahun } t} \times 100$$

Rumus 2:

$$\text{Persentase Peningkatan/Penurunan capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Thn } t - \text{Realisasi Thn } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 3:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya} = \frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Tahun } t-1} \times 100$$

Rumus 4:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan Target Jangka Menengah} = \frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } n} \times 100$$

Rumus 5:

$$\text{Persentase Perbandingan dengan Nasional} = \frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Nasional Thn } t} \times 100$$

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1 Nilai diatas 100% dengan sebutan Sangat Baik (SB)
- 2 Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan Baik (B)
- 3 Nilai diatas 55% sk/d 80% dengan sebutan Cukup (C)
- 4 Nilai dibawah 55% dengan sebutan Kurang (K)

### 3.1.2. PENGUKURAN REALISASI KINERJA.

#### a. Capaian IKU (Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022)

Target Kinerja Tahun 2022 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Penetapan Indikator Kinerja (IKU) telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut maka realisasi capaian kinerja bisa diukur dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.**  
**REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	Target 2022	Realisasi 2022*	Capaian Thd PK (%)
1	2	3	4	5	6
1	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (ton)	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa dalam - Kopi - Pinang	123.074 3.848 55.490 1.194 10.663	122.815 3.111 54.081 1.149 9.910	99,78 80,85 97,46 96,23 92,94
<b>Rata-rata Realisasi Sasaran 1</b>					<b>93,45</b>
	2. Meningkatnya Populasi Ternak (ekor)	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	9.267 758 49.180 845 1.523.260	9.151 748 48.010 809 2.092.871	98,75 98,68 97,62 95,74 137,39
<b>Rata-rata Realisasi Sasaran 2</b>					<b>105,63</b>

Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 yaitu :
  - Meningkatnya produksi komoditi perkebunan diatas 90% (93,45%). Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun untuk kedepannya perlu dilakukan upaya untuk lebih baik lagi.
- Sasaran 2 yaitu :
  - Meningkatnya populasi ternak diatas 100% (105,63%). Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK. Namun kedepannya perlu dipertahankan dan dilakukan upaya yang lebih baik lagi.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3.2.  
Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi*
1.	- Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :	Ton						
	- Kelapa Sawit		144.893	119.501	121.136	122.815	123.074	122.815
	- Karet		4.918	4.315	3.833	3.256	3.848	3.111
	- Kelapa dalam		60.426	55.095	55.050	55.147	55.490	54.081
	- Kopi		1340	1.190	1.189	1.160	1.194	1.149
	- Pinang		12.133	10.578	10.557	8.629	10.663	9.910
	- Jumlah Populasi Ternak	ekor						
	- Sapi		8.902	8.908	9.086	9.038	9.267	9.151
	- Kerbau		780	729	744	731	758	748
	- Kambing		49.228	47.271	48.216	46.784	49.180	48.010
	- Domba		845	813	829	819	845	809
- Unggas		1.058.956	1.464.061	1.493.393	1.486.261	1.523.260	2.092.871	
2.	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	-	-	69.60	64.23	69.80	67.64
	- Nilai IKM Perangkat Daerah	%	-	-	80.25	-	80.30	85.04

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya masih dalam pencapaian kategori baik yaitu diatas 90 %. Namun sejalan dengan pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas daripada kegiatan yang mendukung sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih periode 2021-2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk kedalam misi ke tiga yaitu ***"Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk***

***Pelayanan Publik” dan misi ke empat yaitu “Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”.***

Untuk mendukung misi tersebut ada beberapa program kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat melalui dana APBD II dan untuk Tahun Anggaran 2022 kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

### **1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman**

Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman ini merupakan kegiatan untuk menjaga kelestarian SDG Tanaman Komoditi Perkebunan yang merupakan spesifik lokal seperti Kelapa Dalam Gambut, Kopi Libtukom dan Pinang Betara. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan jumlah Blok Penghasil Tinggi (BPT) tetap bertahan dengan diberikannya bantuan pupuk bagi petani yang kebunnya ditetapkan sebagai BPT. Selanjutnya untuk kedepannya bagi tanaman yang terpilih sebagai Pohon Induk Terpilih (PIT) agar tetap berproduksi dengan baik sesuai dengan umur tanaman yang ada. Adapun jumlah Pohon Induk Terpilih untuk tanaman kelapa dalam sejumlah 3.717 PIK, tanaman pinang sejumlah 3.571 PIP dan 775 PIK untuk tanaman kopi.

### **2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) ini merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebuntingan dan kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk pelayanan kegiatan ini terdapat di 13 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui 13 (tiga belas) orang Inseminator yang ada diharapkan ternak sapi yang ada berkembang dengan peningkatan populasi ternak.

### **3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemeliharaan Kebun Percontohan Kopi Libtukom dan Pemeliharaan Kebun Percontohan Kelapa Sawit yang sudah ada. Dengan adanya kegiatan ini kita tetap memelihara kebun percontohan yang ada melalui pemberian pupuk dan perlakuan sesuai dengan anjuran teknis. Selain itu nantinya hasil dari kegiatan ini adalah untuk menambah Pendapatan Daerah yang merupakan PAD dari Sektor Perkebunan.

#### **4. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat peternak. Tahun 2022 ini selain pengadaan sapi tidak diadakan karena adanya wabah penyakit PMK pada ternak sapi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot dan Mouth Disease). Dari surat Keputusan Menteri Pertanian RI tersebut Provinsi Jambi termasuk daerah wabah PMK.

Selain itu Sapi Bakalan yang ada di Kandang sebanyak 3 (tiga) ekor terus dipelihara di Kandang Eks. UPTD Puskesmas dan IB Desa Pembengis Kec. Bram Itam. Tahun 2022 ini melalui dana APBD I, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan bantuan berupa ternak ayam sebanyak 1.800 ekor dan ternak itik sebanyak 400 ekor. Adapun kelompok tani atau desa/kecamatan yang mendapat bantuan ternak ayam sebanyak 1.800 ekor tersebut antara lain yaitu :

1. Kelompok Tani Tunas Berkah Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir (250 ekor).
2. Kelompok Tani Sekar Tanjung Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir (250 ekor).
3. Ponpes Riyadhus Shalihin Kel. Sungai Nibung Kec. Tungkal Ilir (300 ekor).
4. Kelompok Tani Sri Utomo III Kel. Mekar Jaya Kec. Betara (250 ekor).
5. Kelompok Tani Cahaya Abadi Desa Sungai Terap Kec. Betara (250 ekor).
6. Kelompok Tani Mulya Tani Desa Taman Raja Kec. Tungkal Ulu (500 ekor).

Adapun kelompok tani atau desa/kecamatan yang mendapat bantuan ternak itik sebanyak 400 ekor tersebut antara lain yaitu :

1. Kelompok Tani Terjun Jaya Desa Terjun Gajah Kec. Betara (400 ekor)

#### **5. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar kelompok tani perkebunan yang ada bisa memanfaatkan bantuan hibah tersebut agar hasil perkebunan jauh lebih baik lagi dan dapat meningkatkan produksi serta pendapatan masyarakat /petani pekebun.

Adapun bantuan hibah yang diberikan kepada kelompok tani yaitu bantuan seng untuk lantai jemur pinang dengan kelompok tani penerima sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Al Ikhsan Utama Desa Kuala Indah Kecamatan Kuala Betara sebanyak 500 keping seng.
2. Kelompok Tani Aliran Masa Kelurahan Tungkal V Kecamatan Seberang Kota sebanyak 340 keping seng.
3. Kelompok Tani Harapan Maju Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam sebanyak 600 keping seng.
4. Kelompok Tani Rumpun Tani Desa Sungai Kayu Aro Kecamatan Senyerang sebanyak 700 keping seng.

Tahun 2022 ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sektor peternakan berupa belanja modal peralatan dan mesin antara lain yaitu :

1. Mesin Chopper sebanyak 3 (tiga) unit
2. Kendaraan Bermotor Roda Dua sebanyak 4 (empat) unit
3. Mesin Pres Hidrolik sebanyak 3 (tiga) unit

Untuk belanja modal bangunan gedung kantor dari Dana DAK Fisik tahun 2022 antara lain yaitu :

1. Pembangunan Gedung Puskesmas di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing

Tinggi sebanyak 1 unit.

2. Renovasi Puskesmas Merlung sebanyak 1 unit

Untuk belanja modal bangunan gudang dari Dana DAK Fisik tahun 2022 antara lain yaitu :

1. Pembangunan Gudang Bank Pakan sebanyak 1 unit di Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Pembangunan Gudang Bank Pakan sebanyak 1 unit di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi.
3. Pembangunan Gudang Bank Pakan sebanyak 1 unit di Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang.

Selain itu untuk tahun 2022 ini juga dibangun Kebun Sumber Benih Kopi Libtukom seluas 2 Ha di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara. Pembangunan Kebun Sumber Benih Kopi Libtukom ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kebun sumber benih kopi Libtukom sendiri dan tidak tergantung pada kebun petani kopi yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembangunan kebun sumber benih kopi Libtukom ini juga dimaksudkan agar kopi Libtukom yang merupakan komoditas spesifik lokal milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak punah dan tetap terus ada sebagai ikon Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 6. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis ini dilaksanakan dengan maksud agar ternak yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bisa terlayani untuk pengobatan, pemeriksaan kebuntingan, pemeriksaan spesimen, vaksinasi dan eliminasi. Kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan target DPA Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengobatan	2.000 ekor	2.000 ekor	100 %

2.	PKB	1.000 ekor	1.000 ekor	100 %
3.	Pemeriksaan Spesimen	1.000 ekor	1.000 ekor	100 %
4.	Vaksinasi	2.500 ekor	2.500 ekor	100 %
5.	Eliminasi	100 ekor	100 ekor	100 %

## **7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan**

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan ini dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan produksi komoditi perkebunan. Melalui kegiatan ini dimaksudkan agar tanaman perkebunan tetap terjaga dari serangan hama dan penyakit tanaman. Pengendalian OPT dilaksanakan secara kimia dan hayati. Secara kimia dilaksanakan melalui pemberian obat – obatan berupa insektisida dan herbisida yang sesuai dengan tanaman yang terserang.

Sedangkan untuk pengendalian OPT secara hayati dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan yang merupakan perpanjangan tangan dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan Pengendalian OPT secara hayati dilaksanakan sesuai dengan tupoksi pada UPT Perlindungan Tanaman Perkebunan. Pengendalian OPT yang dilakukan pada tahun 2022 ini antara lain yaitu :

1. Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota seluas 3 Ha untuk pengendalian hama kumbang kelapa pada tanaman kelapa.
2. Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota seluas 15 Ha untuk pengendalian hama kumbang kelapa pada tanaman kelapa.
3. Desa Sungai Gebar Kecamatan Kuala Betara seluas 30 Ha untuk pengendalian penyakit JAP (Jamur Akar Putih).
4. Desa Mandala Jaya Kecamatan Betara seluas 15 Ha untuk pengendalian penyakit JAP pada tanaman kopi dan pinang.
5. Desa Muara Seberang Kec. Seberang Kota seluas 75 Ha untuk pencegahan penyakit hama kumbang kelapa pada tanaman kelapa.
6. Desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam seluas 60 Ha untuk pemasangan sarang perangkap/trapping pengendalian hama kumbang kelapa pada tanaman



kelapa.

7. Desa Pasar Senin Kec. Pengabuan seluas 25 Ha untuk pengendalian hama ulat api pada tanaman kelapa dalam.

## **8. Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar bencana kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha perkebunan tidak terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Apabila terjadi kebakaran lahan, tim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat akan turun bersama-sama Badan Penanggulangan Bencana, Kodim dan Polres.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kebakaran lahan dan kebun yang berjumlah 15 orang. Adapun tugas dari Tim ini adalah melaksanakan pemadaman api jika terjadi bencana kebakaran lahan dan kebun. Sedangkan apabila tidak terjadi kebakaran maka Tim Dalkarlabun akan tetap siaga dan melaksanakan patroli. Adapun lokasi pelaksanaan pengendalian dan patroli yang dilakukan pada Tahun 2022 yaitu :

1. Kecamatan Pengabuan
2. Kecamatan Betara
3. Kecamatan Senyerang
4. Kecamatan Kuala Betara
5. Kecamatan Bram Itam

Selain itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat juga mempunyai Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang berada di 3 (tiga) kecamatan yang juga membantu dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran lahan dan kebun. Adapun KTPA dimaksud adalah sebagai berikut yaitu :

- 1) KTPA Karya Lestari Desa Muntialo Kecamatan Betara
- 2) KTPA Mekar Sari Desa Dataran Pinang Kecamatan Kuala Betara
- 3) KTPA Harapan Jaya Desa Sungai Baung Kecamatan Pengabuan

## **9. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar petani – petani yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya petani kelapa sawit untuk melegalkan usaha taninya. Dengan terdatanya petani pekebun kelapa sawit diharapkan kedepannya data kepemilikan kebun rakyat ini menjadi informasi pendukung dalam mengambil kebijakan. Target STDB Tahun 2022 sebanyak 750 STDB terealisasi 100 % dengan target petani kelapa sawit di Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Tebing Tinggi, Batang Asam, Renah Mendaluh dan Muara Papalik. Selain itu kegiatan ini juga membantu kelembagaan petani supaya lebih baik lagi sehingga memudahkan pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan atau membantu petani melalui program pemerintah seperti program Replanting dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

#### **10. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**

Dalam kegiatan inilah pelatihan terhadap petani dilakukan, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan teknis dan pengembangan SDM. Adapun pelatihan yang diberikan berupa pelatihan untuk menumbuhkan kelembagaan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi serta merubah sikap dan perilaku petani. Ada beberapa kelompok tani yang mendapatkan pelatihan antara lain :

1. Kelompok Tani Mekar Hijau Rimbun III Kec. Betara untuk 1 kelas
2. Kelompok Tani Berkah Makmur Kec. Tungkal Ilir untuk 1 kelas
3. Kelompok Tani Cipta Mandiri Kec. Seberang Kota untuk 1 kelas
4. Kelompok Tani Bumi Aji Kec. Tebing Tinggi
5. Kelompok Tani Tanjung Permai Kec. Betara
6. Kelompok Tani Sri Utomo II Kec. Betara
7. Kelompok Wanita Tani (KWT. Semau Bertuah) Kec. Bram Itam
8. Kelompok Tani Setia Kawan Kec. Kuala Betara

#### **c. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Utama (IKU) dengan Target RENSTRA 2021-2026.**

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2022 terhadap total target Renstra di Tahun 2023 :

**Tabel 3.3.**  
**REALISASI CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2022**  
**TERHADAP TARGET RENSTRA 2023**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	Target Renstra 2023	Realisasi 2022(*)	Capaian Thd Target Renstra 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :			
		- Kelapa Sawit	125.166	122.815	98,12
		- Karet	3.867	3.111	80,45
		- Kelapa Dalam	55.989	54.081	96,59
		- Kopi	1.200	1.149	95,75
		- Pinang	10.780	9.910	91,93
<b>Rata-rata Realisasi</b>					<b>92,57</b>
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) :			
		- Sapi	9.452	9.151	96,82
		- Kerbau	773	748	96,77
		- Kambing	50.163	48.010	95,70
		- Domba	861	809	93,96
		- Unggas	1.553.260	2.092.871	134,74
<b>Rata-rata Realisasi</b>					<b>103,59</b>
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,90	67,64	96,76
		- Nilai IKM Perangkat Daerah	80,35	85,04	105,83

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU terhadap Target Renstra 2023 yang disajikan pada tabel tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil masing - masing

dari ke-2 sasaran kinerja tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** yaitu :

- **Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)**, yang mana indikator perbandingan Produksi Komoditi Perkebunan pada Tahun 2022 terhadap target renstra Tahun 2023 rata-rata sebesar **92,57%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa terdapat selisih sebesar 7,43% yang harus diupayakan OPD dalam mendorong peningkatan produksi komoditi perkebunan agar pada target periode Renstra secara **kualitatif** dan **kuantitatif** memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun dari skala penilaian masih dalam target (**BAIK**) **Skala 80%-100%**.
- **Meningkatnya Populasi Ternak (Ekor)**, indikator perbandingan Populasi Ternak pada tahun 2022 diatas rata-rata terhadap target kinerja tahun 2023 sebesar 103,59%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa peningkatan populasi ternak secara kualitatif dan kuantitatif telah memenuhi target periode Renstra yang telah ditetapkan.

2. **Sasaran 2** yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang mana pada tahun 2022 capaian terhadap target renstra tahun 2023 sebesar 99,76% untuk indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah, sedangkan untuk indikator Nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 105,83%. Kondisi tersebut ditafsirkan bahwa ada selisih 0,28% yang harus diupayakan OPD dalam mendorong peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah untuk indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah, sedangkan untuk indikator Nilai IKM Perangkat Daerah telah mencapai target periode Renstra.

d. **Analisa Program (OUTCOME) dan Kegiatan dan Sub Kegiatan (OUTPUT) Tahun 2022 yang mendukung Dalam Pencapaian Kinerja**

Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2022 tentunya didukung oleh realisasi dari kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2022  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJAB BARAT**

Urusan Pilihan

Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	(% Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Penanggung Jawab
Prog	Keg						
3.27.01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>Sekretaris</b>
3.27.01.2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Renstra, Renja,DPA,Evaluasi Renstra,Evaluasi Renja dan Lakip</b>	<b>10 dokumen</b>	<b>10 dokumen</b>	<b>100%</b>	
3.27.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	
3.27.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	2 laporan	100%	
3.27.01.2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Keuangan Tahunan OPD</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100%</b>	
3.27.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 bulan	12 bulan	100%	
3.27.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.01.2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	
3.27.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Umum</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	

3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemda</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	13 unit	100 %	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda</b>	<b>100 %</b>	<b>91.89%</b>	<b>98.53%</b>	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 unit	24 unit	98.71%	

3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	17 unit	95.44%	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	27 unit	100%	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	
3.27.02	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)</b>	<b>1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,6%, karet = 0,4 %, kelapa dalam = 0,8%,kopi = 0,3% pinang = 1,0% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 71 %</b>	<b>1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,8%, karet = 0,2 %, kelapa dalam = 0,9%,kopi = 0,3% pinang = 0,9% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 82 %</b>	<b>92,28 %</b>	<b>Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan</b>
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.02.2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Bertambahnya luas Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam, Kopi dan Pinang 2. Tekelolanya kebun percontohan Kopi dan Kelapa Sawit serta tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan 3. Jumlah Ternak yang di IB dan Sinkron</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	

3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	3 VUB	100%	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanamani	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	100%	
<b>3.27.02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain</b>	<b>1. Tersedianya Sapi Bakalan di Kandang, Ternak Sapi, Kambing dan Unggas yang dihibahkan 2. Tersedianya Bibit Hijauan Pakan Ternak</b>	<b>1. 7 ekor, 2. 0,5 ton</b>	<b>1. 0 ekor, 2. 0,5 ton</b>	<b>98.50%</b>	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	7 ekor	0 ekor	97%	
	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0.5 ton	0.5 ton	100 %	
3.27.03	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Peternakan sesuai peruntukannya</b>	<b>22 %</b>	<b>22 %</b>	<b>100 %</b>	<b>Kabid Supras</b>
3.27.03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>1. Bertambahnya Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan/Peternakan 2. Terkelolanya kebun percontohan kelapa sawit</b>	<b>7 unit</b>	<b>7 unit</b>	<b>100 %</b>	
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 unit	2 unit	100 %	
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1 unit	100 %	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit	4 unit	100 %	



3.27.03.2.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah	1 laporan	1 laporan	100 %	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak	1,6 %	1,6 %	100 %	Kabid Peternakan
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak	100 %	100 %	100 %	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.04.2.01	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan	1 laporan	1 laporan	100 %	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	1 laporan	100 %	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan	100%	100%	97%	Kabid Perkebunan dan Kabid Peternakan
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalnya OPT Perkebunan dan Kebakaran Lahan/Kebun Masyarakat	100 %	100 %	100 %	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	200 Ha	100 %	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan	30 Ha	30 Ha	100 %	

<b>3.27.06</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan</b>	<b>350 STDB</b>	<b>350 STDB</b>	<b>100%</b>	<b>Kabid Sapras</b>
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya petani pekebun yang mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 dokumen	1 dokumen	100%	
<b>3.27.07</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternakan</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100%</b>	<b>Kabid Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran</b>
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1. Meningkatnya Materi Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan dan Peternakan 2. Tersusunnya Data Komoditi Perkebunan/Peternakan</b>	<b>12 unit</b>	<b>12 unit</b>	<b>100 %</b>	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 unit	11 unit	100 %	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 unit	1 unit	100 %	

*Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2022 OPD*

### **3.1.3. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Adanya 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Dalam pencapaian Indikator jumlah produksi komoditi perkebunan yaitu peningkatan produksi komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya harga komoditi perkebunan sementara biaya produksi atau pengolahan lahan tinggi, selain itu banyaknya petaninya yang beralih komoditi yang nilai jual hasil produksinya menjanjikan atau lebih mahal seperti komoditi kelapa sawit.
2. Sedangkan untuk indikator bidang peternakan bahwa secara keseluruhan sudah baik dalam mencapai target dan sasaran kinerja, namun perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada peternak untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara rutin dan menambah jumlah tenaga medis seperti paramedis dan dokter hewan.
3. Terbatasnya jumlah pegawai dan tenaga teknis yang ada dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang harusnya ada pada dinas teknis.

Oleh karena itu dari berbagai kendala yang ada tentunya perlu dilakukan upaya – upaya untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja dinas antara lain sebagai berikut :

- Mencari alternatif solusi yang harus dilakukan dengan cara meningkatkan teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman.
- Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada peternak untuk melakukan pemeriksaan rutin dengan memanfaatkan Tenaga Kesehatan Hewan yang terdapat pada Puskesmas.
- Mengikuti bimtek atau pelatihan bagi petugas teknis.

### **3.1.4. EVALUASI CAPAIAN KINERJA**

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:

- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;
- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, intensifikasi serta pendukung prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air, optimasi lahan dan irigasi;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan kinerja OPD dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan, serta pengolahan produk perkebunan.

Sedangkan untuk sektor peternakan berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 sudah diatas 100% atau sebesar 103,59%.. Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK. Namun kedepannya perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi sehingga nantinya pencapaian kinerja dapat terealisasi dengan baik pula.

### **3.2. REALISASI ANGGARAN (REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH), EFEKTIVITAS ANGGARAN dan EFISIENSI ANGGARAN**

#### **3.2.1. REALISASI PENDAPATAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga termasuk OPD yang menyumbangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari Pengelolaan Komoditi Perkebunan dan Peternakan antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp.) Tahun 2022	Realisasi (Rp.) Tahun 2022	%
A.	Pendapatan Asli Daerah	85.000.000.-	105.151.540.-	123,71
	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	85.000.000,-	105.151.540,-	123,71
1	Hasil Penjualan Tanaman	40.000.000,-	60.851.540,-	152,13
2	Hasil Penjualan Hewan	45.000.000.-	44.300.000,-	98,44
<b>Jumlah</b>		<b>85.000.000,-</b>	<b>105.151.540,-</b>	<b>123,71</b>

### 3.2.2. REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Untuk Tahun 2022 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 11.161.071.333.99- (85.85 %) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 13.000.698.566.- dan dapat dilihat pada uraian dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.000.698.566.-</b>	<b>11.161.071.333.99.-</b>	<b>85.85</b>
I.	<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.366.360.166.-</b>	<b>8.583.110.354.70.-</b>	<b>82.80</b>
1.1	Belanja Pegawai	5.303.132.001.-	3.956.094.432.-	74.60
1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.663.038.165.-	4.272.779.322,70.-	91.63
1.3	Belanja Hibah	400.190.000.-	354.236.600.-	88.52
II.	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.634.383.400.-</b>	<b>2.577.960.979.29.-</b>	<b>97.86</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>13.000.698.566.-</b>	<b>11.161.071.333.99.-</b>	<b>85.85</b>

Untuk rincian belanja per kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana

terinci dibawah ini :

**REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp.	%	
<b>3.27.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.084.933.514.-</b>	<b>5.669.644.870.-</b>	<b>80.02</b>	<b>100</b>
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>156.149.690.-</b>	<b>156.149.690.-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.004.314.-	35.004.314.-	100	100
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.145.376.-	121.145.376.-	100	100
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.323.892.001.-</b>	<b>3.980.934.432.-</b>	<b>86.94</b>	<b>100</b>
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.139.752.001.-	3.796.794.432.-	73.87	100
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.140.000.-	184.140.000.-	100	100
<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>38.319.200.-</b>	<b>38.124.060.-</b>	<b>99.49</b>	<b>100</b>
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.319.200.-	38.124.060.-	99.49	100
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>720.279.884.-</b>	<b>707.442.820.-</b>	<b>98.22</b>	<b>100</b>
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.524.310.-	3.524.310.-	100	100
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.427.824.-	72.472.824.-	100	100
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.320.000.-	19.160.000.-	99.17	100

3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.676.900.-	16.676.900.-	100	100
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000.-	6.045.000.-	75.56	100
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.285.850.-	589.563.786.-	98.21	100
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.282.000.-</b>	<b>125.432.800.-</b>	<b>99.33</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.282.000.-	125.432.800.-	99.33	100
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.282.000.-</b>	<b>125.432.800.-</b>	<b>99.33</b>	<b>100</b>
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.160.000.-	5.159.600.-	99.99	100
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.220.000.-	65.374.967.-	77.62	100
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.300.000.-	142.300.000.-	100	100
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>488.330.739.-</b>	<b>448.726.501.-</b>	<b>91.89</b>	<b>98.53</b>
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.150.000.-	107.309.697.-	89.31	98.71
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.898.300.-	119.775.160.-	82.09	95.44
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.600.000.-	18.600.000.-	100	100
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.682.439.-	203.041.644.-	99.69	100
<b>3.27.02</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>725.339.928.-</b>	<b>668.171.608.-</b>	<b>92.12</b>	<b>100</b>



	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>90.615.000.-</b>	<b>87.638.000.-</b>	<b>96.71</b>	<b>100</b>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	90.615.000.-	87.638.000.-	96.71	100
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>548.014.720.-</b>	<b>495.473.550.-</b>	<b>90.41</b>	<b>100</b>
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	22.775.000.-	22.775.000.-	100	100
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	292.721.220.-	248.112.300.-	84.76	100
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	232.518.500.-	224.586.250.-	96.59	100
<b>3.27.02.2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain</b>	<b>86.710.208.-</b>	<b>85.060.358.-</b>	<b>98.42</b>	<b>100</b>
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	53.140.000.-	51.530.150.-	96.97	100
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	33.570.208.-	33.530.208.-	99.88	100
<b>3.27.03</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>3.419.372.704.-</b>	<b>3.175.342.329.-</b>	<b>92.86</b>	<b>100</b>
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>3.337.273.500.-</b>	<b>3.094.418.929.-</b>	<b>92.72</b>	<b>100</b>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	132.350.000.-	104.285.150.-	78.79	100
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.000.000.-	150.000.000.-	100	100
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.054.923.500.-	2.840.133.779.-	92.97	100

	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>82.099.204.-</b>	<b>80.923.400.-</b>	<b>98.57</b>	<b>100</b>
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur Ternak	82.099.204.-	80.923.400.-	98.57	100
<b>3.27.04</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>1.207.268.008.-</b>	<b>1.108.007.815.-</b>	<b>91.78</b>	<b>100</b>
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.066.482.968.-</b>	<b>985.971.425.-</b>	<b>92.45</b>	<b>100</b>
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.066.482.968.-	985.971.425.-	92.45	100
	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>140.785.040.-</b>	<b>122.036.390.-</b>	<b>86.68</b>	<b>100</b>
	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	140.785.040.-	122.036.390.-	86.68	100
<b>3.27.05</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>200.772.232.-</b>	<b>189.492.232.-</b>	<b>94.38</b>	<b>100</b>
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>200.772.232.-</b>	<b>189.492.232.-</b>	<b>94.38</b>	<b>100</b>
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	94.922.232.-	94.742.232.-	99.81	100
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	105.850.000.-	94.750.000.-	89.51	100
<b>3.27.06</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>145.485.997.-</b>	<b>132.885.997.-</b>	<b>91.34</b>	<b>100</b>
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.485.997.-</b>	<b>132.885.997.-</b>	<b>91.34</b>	<b>100</b>

3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	145.485.997.-	132.885.997.-	91.34	100
<b>3.27.07</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>217.526.183.-</b>	<b>217.526.183.-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>217.526.183.-</b>	<b>217.526.183.-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	153.623.163.-	153.623.163.-	100	100
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	63.903.020.-	63.903.020.-	100	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.000.698.566.-</b>	<b>11.161.071.333,99.-</b>	<b>85.85</b>	<b>96.57</b>

*Keterangan : OUTCOME dan OUTPUT telah menyesuaikan dengan APBD-P TA 2021 OPD*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Keuangan sebesar **85,85% (Delapan puluh lima koma delapan puluh lima persen)** dan Realisasi fisik sebesar **96,57% (Sembilan puluh enam koma lima puluh tujuh persen)**, rincian anggaran belanja tahun 2022 tersebut semuanya telah tertuang didalam **APBD-P TA 2022**.

### 3.2.3. EFEKTIVITAS ANGGARAN.

**Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996** mendefinisikan efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real Dinas.

Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan yang terlihat dalam tabel tingkat efektivitas dihitung pada tahun 2022. **Tingkat Efektivitas** digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

Tingkat Efektivitas Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti <b>Sangat Efektif</b>
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% berarti <b>Efektif</b>
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti <b>Cukup Efektif</b>
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti <b>Kurang Efektif</b>
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti <b>Tidak Efektif</b>

Dari tabel Total Belanja dan Total Realisasi Belanja Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA DAERAH	13.000.698.566.-	11.161.071.333.99.-	85.85
I.	Belanja Operasi	10.366.360.166.-	8.583.110.354.70.-	82.80
1.1	Belanja Pegawai	5.303.132.001.-	3.956.094.432.-	74.60
1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.663.038.165.-	4.272.779.322,70.-	91.63
1.3	Belanja Hibah	400.190.000.-	354.236.600.-	88.52
II.	Belanja Modal	2.634.383.400.-	2.577.960.979.29.-	97.86
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.000.698.566.-</b>	<b>11.161.071.333.99.-</b>	<b>85.85</b>

Tingkat *efektivitas anggaran* belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan setelah dihitung berdasarkan tabel diatas tergolong cukup efektif dengan tabel sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2022	%	Skor (Penilaian)
1	2	3 = ½	4
Rp. 11.161.071.333,99,-	Rp.13.000.698.566,-	85,85	Cukup Efektif

### 3.2.4. EFISIENSI ANGGARAN.

Keputusan Mendagri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 mengelompokkan Efisiensi sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Anggaran	
A	Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti <b>Tidak Efisien</b>
B	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90% sampai 100% <b>Kurang Efisien</b>
C	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80% sampai 90% berarti <b>Cukup Efisien</b>
D	Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60% sampai 80% berarti <b>Efisien</b>
E	Hasil perbandingan tingkat pencapaian kurang 60% berarti <b>Sangat Efisien</b>

Tingkat *efisiensi anggaran belanja* Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan realisasi anggaran digolongkan **Cukup Efisien** dengan tabel sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2022	%	Skor (Penilaian)
1	2	3 = ½	4
Rp. 11.161.071.333,99,-	Rp.13.000.698.566,-	85,85	Cukup Efisien

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan berdasarkan PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran dan Indikator Kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dari anggaran indikatif yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) yang disajikan pada tabel di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil masing-masing dari ke 3 (tiga)

indikator kerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 yaitu :

- Meningkatnya produksi komoditi perkebunan diatas 90% atau sebesar 92,57%. Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun untuk kedepannya perlu dilakukan upaya untuk lebih baik lagi.
- Meningkatnya populasi ternak diatas 100% (103,59%). Pencapaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK. Namun kedepannya perlu dipertahankan dan dilakukan upaya yang lebih baik lagi untuk mempertahankannya.

2. Sasaran 2 yaitu meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilihat dari realisasi sasaran yaitu diatas 90 % atau sebesar 99.76%. Pencapaian kinerja ini dinilai BAIK. Namun untuk kedepannya perlu dilakukan upaya untuk menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk indikator Nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 105,83% dan telah mencapai target periode Renstra.

Dari kondisi tersebut diatas dapat ditafsirkan, bahwa masih perlu upaya yang harus dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi komoditi perkebunan secara **kualitatif** dan **kuantitatif** masih dalam target **B (BAIK) Skala 80%-100%**. Sedangkan untuk peningkatan populasi ternak untuk capaian tersebut secara kualitatif dan kuantitatif juga masih dalam target **A (SANGAT BAIK) Skala** diatas **100%** sehingga perlu dipertahankan dan peningkatan yang lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang.

Sedangkan untuk Realisasi Keuangan Tahun 2022 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini sebesar 85.85 % atau sebesar Rp. **11.161.071.333,99.-** dari total anggaran sebesar Rp. **13.000.698.566.-**. Untuk lebih rinci jenis belanjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Belanja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	BELANJA DAERAH	13.000.698.566.-	11.161.071.333.99.-	85.85
I.	Belanja Operasi	10.366.360.166.-	8.583.110.354.70.-	82.80



1.1	Belanja Pegawai	5.303.132.001.-	3.956.094.432.-	74.60
1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.663.038.165.-	4.272.779.322,70.-	91.63
1.3	Belanja Hibah	400.190.000.-	354.236.600.-	88.52
II.	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.634.383.400.-</b>	<b>2.577.960.979.29.-</b>	<b>97.86</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.000.698.566.-</b>	<b>11.161.071.333.99.-</b>	<b>85.85</b>

Dari realisasi belanja Tahun 2022 diatas dapat kita simpulkan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran sebagai berikut :

**- Efektivitas Anggaran**

Realisasi Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2022	%	Skor (Penilaian)
1	2	3 = ½	4
Rp. 11.161.071.333,99,-	Rp.13.000.698.566,-	85,85	Cukup Efektif

**- Efisiensi Anggaran**

Realisasi Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2022	%	Skor (Penilaian)
1	2	3 = ½	4
Rp. 11.161.071.333,99,-	Rp.13.000.698.566,-	85,85	Cukup Efisien

Dari gambaran hasil pengukuran Tahun 2022 tersebut diatas, untuk efektivitas anggaran cukup efektif karena realisasi anggaran mencapai 85.85 % namun untuk realisasi

fisik kegiatan mencapai 96.57 %. Hal ini tentunya secara efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mencapai tingkat efisien. Sehingga secara keseluruhan masih diperlukan adanya optimalisasi untuk realisasi anggaran kedepannya sehingga tentunya capaian fisik kegiatan lebih baik lagi.

Selain itu untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja secara optimal maka seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan lebih bekerja lebih giat lagi sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Kuala Tungkal, Januari 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**DIAN ISMAIL PARIPURNA, S.Sos.**

**Pembina Tk. I**

NIP. 19730505 199602 1 001